

## **Collaborative Governance Sebagai Upaya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bojonegoro**

**Fruri Stevani<sup>1\*</sup>, Niken Widoretno<sup>2</sup>, Ferri Irawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>IKIP PGRI Bojonegoro, Jl. Ahmad Yani, Kel. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur  
E-mail: [fruri.stevani@ikipgribojonegoro.ac.id](mailto:fruri.stevani@ikipgribojonegoro.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4525>

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history**

*Received: 23 Nov 2025*

*Revised: 05 Dec 2025*

*Accepted: 23 Dec 2025*

#### **Kata Kunci:**

Tata Kelola Kolaboratif,  
Ekonomi Kreatif  
Tata Kelola Kolaboratif,  
Ekonomi Kreatif

#### **Keywords:**

*Collaborative  
Governance,  
Ekonomi Kreatif  
Collaborative  
Governance,  
Creative Economy*

### **ABSTRACT**

Ekonomi kreatif merupakan sektor strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional, di mana peran pemerintah dan swasta sangat krusial dalam menciptakan ekosistem yang kondusif. *Collaborative governance* dengan berbagai pihak sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan Bojonegoro sebagai kota kreatif yang di dukung dengan terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan juga data sekunder, sedangkan untuk teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* pada program ekonomi kreatif di Kabupaten Bojonegoro terealisasi dengan cukup baik. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan adaptif dan fasilitatif, sementara sektor kolaborasi lainnya berkontribusi dalam investasi, teknologi, serta jejaring bisnis yang lebih luas. Beberapa tantangan utama mencakup birokrasi kompleks, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta kesenjangan akses sumber daya. Untuk mengoptimalkan strategi kemitraan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif berbasis kepentingan bersama, transparansi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

*The creative economy is a strategic sector in national economic growth, where the role of the government and the private sector is crucial in creating a conducive ecosystem. Collaborative governance with various parties is a concrete effort to achieve the shared goal of realizing Bojonegoro as a creative city supported by the formation of a creative economy ecosystem in Bojonegoro Regency. This study uses qualitative research methods. Data in this study were obtained from primary and secondary data, while data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. This study shows that collaborative governance in the creative economy program in Bojonegoro Regency has been realized quite well. The government plays a role in providing adaptive and facilitative policies, while other collaborative sectors contribute to investment, technology, and broader business networks. Some key challenges include complex bureaucracy, lack of cross-sector coordination, and disparities in access to resources. To optimize this partnership strategy, a collaborative approach based on shared interests, transparency, and increased human resource capacity is needed.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



**How to Cite:** Fruri Stevani, et al (2025). *Collaborative Governance Sebagai Upaya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bojonegoro*, 4(3) 14531-14538. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4525>

### **PENDAHULUAN**

*Collaborative governance* adalah suatu kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam mewujudkan kepentingan instansi masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. (cordery,2004; harteman et al.,2002). Dalam *collaborative governance* akan menemui banyak kendala jika adan banyak mengalami hambatan pada kebijakan hirarki organisasi,masih kurangnya keyakinan

pemerintah, adanya ketidakpercayaan penduduk, kurangnya informasi, terbatasnya sumber daya manusia dan kurang terlibatnya stakeholder lain seperti kapasitas pemerintahan lokal. Hal ini bisa diartikan bahwa collaborative governance sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan yang dikendaki, jika collaborative governance berjalan secara benar serta maksimal maka tujuan dicapai secara efektif antara pemerintah dan kelompok kepentingan yang relevan.

Di era digitalisasi dan globalisasi, ekonomi kreatif telah muncul sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Industri ini di Indonesia memiliki banyak potensi untuk meningkatkan identitas budaya lokal, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja. Melalui sejumlah undang-undang dan inisiatif, pemerintah telah mengakui perlunya pengembangan ekonomi kreatif; Namun, kurangnya pendanaan sering kali membuat hal ini sulit dicapai. Dengan demikian, membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan pendekatan kolaboratif antara sektor publik dan komersial. Sektor ekonomi yang dibangun atas ide, daya cipta, dan imajinasi, ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan identitas budaya negara, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan nilai ekonomi. Pertumbuhan teknologi digital dan dinamika pasar global menjadikan ekonomi kreatif sebagai strategi utama dalam konteks pembangunan nasional. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2023), industri ini menyumbang lebih dari 7,8% PDB Indonesia, dengan subsektor teratas seperti fesyen, kriya, dan kuliner menguasai pasar lokal dan internasional (Riswanto, 2023). Meningkatnya jumlah pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, terutama yang berusia muda, yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan barang dan jasanya. Platform digital seperti jejaring sosial, e-commerce, dan pasar yang didedikasikan untuk karya-karya kreatif telah menciptakan peluang baru bagi ekonomi kreatif lokal untuk tumbuh. Namun, masih terdapat kendala utama yang menghalangi perluasan ini, termasuk infrastruktur yang tidak merata di seluruh wilayah, literasi digital yang rendah, akses terbatas terhadap pendanaan, dan kurangnya fasilitas untuk inkubasi perusahaan. Namun, ada juga tren yang baik dari sektor swasta, yang mulai menunjukkan minat untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif melalui akses pasar, pelatihan SDM, program investasi, dan penciptaan ruang-ruang kreatif. Negara Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti program BEKRAF, Indonesia Creative Cities Network (ICCN), dan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Wahjono, 2021).

Collaborative governance bertujuan untuk memecahkan masalah atau konten tertentu pada pihak terikat. Pihak ini tidak terbatas pada organisasi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan serta pengambilan keputusan. Dalam perencanaan tujuan, visi misi, norma dan juga nilai bersama dalam kerja sama, posisi setiap anggota adalah sebanding yang berarti mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan secara bebas meskipun dibatasi pada kesepakatan bersama Pemerintahan yang disusun collaborative governance yang didalamnya terdapat public dan instansi pemerintahan pada proses musyawaran pengambilan kesepakatan bersama yang sifatnya resmi, berorientasi berdasarkan kesepakatan dan pembagian kebijakan atau dalam mengelola program public serta asset public (Chris Ansel & Alison Gash, 2007).

Potensi besar ekonomi kreatif menjadi bagian dari sektor yang sangat berperan bagi Indonesia untuk merealisasikan Negara yang independen, adil, makmur serta maju. Di Indonesia sumber daya ekonomi dikelola secara berlimpah, yakni SDM kreatif dalam kapasitas yang besar, Sumber Daya Alam yang melimpah, serta warisan budaya yang beraneka ragam dan unik. Ketiga hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dapat diartikan bahwa Collaborative Governance memegang peranan penting dalam mencapai tujuan. Hal-hal tertentu ketika tata kelola bersama dapat saling terkait secara tepat dan optimal pemerintah dan pemangku kepentingan akan memastikan bahwa tujuan tercapai secara efektif. Peneliti yang tertarik meneliti lebih lanjut tentang tata kelola kolaboratif dalam program industri kreatif perkotaan Palembang.

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang dibangun atas dasar ide, penemuan, dan kreativitas yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan identitas budaya bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi nilai ekonomi. Pertumbuhan teknologi digital dan dinamika pasar global menjadikan ekonomi kreatif sebagai strategi utama dalam konteks pembangunan nasional. Menurut data Badan Ekonomi Kreatif, kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional masih terus meningkat. Hal ini menunjukkan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Musta'in, 2022).

Namun, inisiatif pemerintah saja tidak dapat menopang pertumbuhan sektor kreatif. Baik melalui investasi, pelatihan, inkubasi perusahaan, atau fasilitasi pasar, keterlibatan sektor swasta sangat penting. Dengan demikian, komponen mendasar dalam mengembangkan lingkungan yang mendukung perluasan industri kreatif adalah rencana kolaborasi pemerintah-sektor swasta. Pendanaan, bantuan untuk infrastruktur kreatif, dan sinergi kebijakan merupakan bagian dari kemitraan ini. Namun, ada sejumlah tantangan yang sering muncul ketika kemitraan dilaksanakan di lapangan, termasuk birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antarpelaku, dan perbedaan tujuan antara sektor publik dan swasta. Maka dari itu, penting untuk menganalisis strategi kemitraan yang telah dan sedang dijalankan, guna merumuskan model kolaborasi yang lebih efektif dan berorientasi pada dampak jangka panjang.

## **METODE**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Collaborative Governance dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif***

Untuk mendorong ekosistem yang lebih dinamis dan berkelanjutan, kemitraan antara sektor publik dan komersial merupakan cara cerdas untuk menyatukan sumber daya, jaringan, dan pengalaman dari kedua belah pihak. Beberapa model kemitraan telah digunakan untuk membantu sektor ekonomi kreatif di Indonesia dan di seluruh dunia, menurut temuan tinjauan pustaka dan analisis kebijakan.

Collaborative governance dalam pengembangan ekonomi kreatif merupakan pendekatan strategis yang dapat menciptakan sinergi antara kebijakan publik dan dinamika pasar. Dalam konteks ekonomi kreatif, model kemitraan ini tidak hanya melibatkan pembiayaan proyek, tetapi juga mencakup transfer pengetahuan, pengembangan kapasitas, serta fasilitasi akses pasar bagi pelaku industri kreatif, terutama UMKM dan *startup* berbasis inovasi. Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2020), model kemitraan yang efektif dalam pengembangan sektor kreatif melibatkan kolaborasi dalam bentuk *co-creation*, *co-financing*, dan *co-management*, di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator, sementara sektor swasta menyediakan sumber daya finansial, teknologi, serta akses jaringan distribusi. Model ini selaras dengan pendekatan "Hexahelix" yang mengintegrasikan empat aktor utama: pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas yang mendorong inovasi sosial dan ekonomi secara simultan (Darmawan, 2022).

Menurut Teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), kemitraan yang efektif terbentuk apabila ada konsensus, partisipasi setara, serta akuntabilitas antar aktor dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, model kemitraan harus dibangun secara partisipatif dengan memperhatikan keunikan sektor kreatif yang dinamis dan lintas-disiplin. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan kerangka regulasi dan insentif, sementara sektor swasta bertindak sebagai motor penggerak inovasi melalui investasi, riset pasar, dan jejaring distribusi.

Berdasarkan hasil kajian pada beberapa daerah kreatif di Indonesia, seperti Yogyakarta dan Bandung, ditemukan bahwa model kemitraan paling efektif adalah yang berbasis pada *co-creation model*, yaitu kerja sama sinergis dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi. Model ini mengedepankan dialog terbuka, transparansi peran, dan distribusi risiko serta manfaat secara adil. Adapun bentuk konkret dari kemitraan ini dapat berupa pembangunan *creative hub*, pelatihan terpadu kewirausahaan, pengembangan platform digital pemasaran produk kreatif, hingga skema pembiayaan berbasis *impact investment*. Di Jakarta, misalnya, inisiatif "Jakarta Creative Hub" adalah hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa perusahaan swasta dalam menyediakan ruang ekspresi, inkubasi bisnis, dan akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif muda (Mulyani, 2021).

### ***Strategi Kabupaten Bojonegoro dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif***

Pengembangan industri kreatif Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa sub sektor utama yaitu, kuliner, kriya, seni pertunjukan dll. Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar 2013 melihat pertumbuhan ekonomi kreatif, laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,74% diatas 5,76%. 2015-2019 kontribusi industri kreatif terhadap PDB seharusnya 7- 7,5%. Persyaratan pertumbuhan PDB

industry minimal 5-6%. Selain itu adanya Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu strategi dalam menciptakan ekosistem subsektor ekonomi dan kreatif khas kabupaten Bojonegoro dan membantu pemerintah kabupaten untuk mempromosikannya. Hal ini juga mempengaruhi pengembangan ekonomi kreatif, jika hasil yang diperoleh dari tes pilih sub sektor yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro. Komite Ekonomi Kreatif dapat membantu dengan industry seperti pendampingan, mengevaluasi subsektor yang diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kota kreatif karena beberapa indikator. Bagaimana distribusi untuk konsumsi seperti apapun yang layak untuk produk kreatif. Dari bermacam sub-sektor ekonomi kreatif yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan bisa meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya program Ekonomi Kreatif juga diharapkan bisa meningkatkan pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Bojonegoro, sehingga bisa mencapai kesejahteraan pada masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif. Sumber Daya Manusia menjadi salah satu aspek yang berperan penting pada pembangunan ekonomi di setiap daerah, SDM yang baik akan menghasilkan ekonomi yang baik dalam perekonomian (Dwiyanto Agus, 2010)

### ***Faktor Pendukung dan Tantangan Keberhasilan Collaborative Governance dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif***

Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta merupakan elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Agar kemitraan ini berjalan efektif, terdapat sejumlah faktor strategis yang menjadi penentu keberhasilannya.

### **Ketersediaan Infrastruktur Kreatif dan Akses Teknologi**

Dengan tersedianya infrastruktur kreatif dan akses terhadap teknologi merupakan elemen krusial dalam menunjang pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif. Infrastruktur kreatif meliputi fasilitas fisik seperti ruang kerja bersama (co-working space), studio produksi, pusat desain, hingga galeri dan ruang pertunjukan yang berfungsi sebagai sarana eksplorasi, kolaborasi, serta distribusi karya kreatif. Keberadaan infrastruktur ini tidak hanya mendukung efisiensi proses produksi, tetapi juga mendorong terciptanya komunitas kreatif yang dinamis dan inovatif. Di sisi lain, akses terhadap teknologi, baik dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun konektivitas digital, menjadi kebutuhan utama bagi pelaku ekonomi kreatif untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Teknologi digital juga memungkinkan munculnya berbagai model bisnis baru seperti platform e-commerce, layanan streaming, hingga pemasaran berbasis media sosial yang mampu membuka peluang pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, peran pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan dalam memperluas jangkauan infrastruktur dan akses teknologi, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah-daerah yang belum terjangkau secara optimal. Dengan dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai, ekosistem ekonomi kreatif akan semakin inklusif, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Rustan, 2020).

### **Kebijakan yang Inklusif dan Adaptif**

Keberhasilan kemitraan publik-swasta tidak terlepas dari peran kebijakan publik yang mampu merespons kebutuhan industri secara fleksibel. Regulasi yang memberikan insentif fiskal, kemudahan perizinan, serta perlindungan hak kekayaan intelektual mendorong partisipasi aktif sektor swasta. Di sisi lain, kebijakan yang bersifat top-down dan birokratis justru dapat menghambat laju kolaborasi. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan berbasis aspirasi pemangku kepentingan menjadi pilihan strategis

### **Komitmen Bersama dan Kepercayaan Mitra**

Kemitraan yang solid dan berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, kemitraan yang terjalin antara pemerintah, swasta, komunitas kreatif, dan lembaga pendukung lainnya membutuhkan kesamaan visi, kesepahaman terhadap tujuan bersama, serta kesediaan untuk saling mendukung dalam setiap proses yang dijalankan. Komitmen bersama mencerminkan tekad dari seluruh pihak untuk berkontribusi secara aktif dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor kreatif, baik melalui kebijakan, investasi, pelatihan, maupun kolaborasi program. Sementara itu, kepercayaan antarmitra menjadi unsur yang tidak kalah penting dalam menjaga keberlangsungan kerja sama, mengingat sektor ekonomi kreatif sangat bergantung pada interaksi, inovasi, dan proses kolaboratif yang dinamis. Ketika kepercayaan telah terbentuk, maka akan tercipta

hubungan yang transparan, komunikasi yang terbuka, serta pemecahan masalah yang lebih efektif. Tanpa adanya komitmen dan kepercayaan, kemitraan cenderung bersifat transaksional dan jangka pendek, sehingga tidak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan kepercayaan harus diiringi dengan mekanisme evaluasi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar kemitraan dalam ekonomi kreatif dapat berjalan harmonis dan berdaya guna secara maksimal (Habib,2021)

### **Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kreatif**

Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Bidang Pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang handal. Hal ini disebabkan karena banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai SDM yang handal dan berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam perekonomian dunia. Dalam kaitan ini, salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM adalah pendidikan. Karena itu, kualitas SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya tujuan pembangunan Indonesia yang tertera dalam UUD 45 dan amandemennya. Sumber daya manusia menjadi motor utama dalam ekonomi kreatif (Utama,2017). Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendidikan vokasi, mentoring bisnis, dan program inkubasi menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah dapat menyediakan dukungan regulatif dan pendanaan, sementara sektor swasta berkontribusi dalam bentuk transfer teknologi dan pengalaman industri. Pendekatan kolaboratif dalam pengembangan SDM akan mempercepat profesionalisasi sektor kreatif.

### **Keterlibatan Komunitas dan Potensi Lokal**

Keterlibatan komunitas dan penguatan potensi lokal merupakan aspek strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif. Komunitas kreatif memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu mendorong inovasi, pelestarian budaya, serta penciptaan nilai ekonomi berbasis kearifan lokal. Melalui partisipasi aktif komunitas, ide-ide kreatif dapat tumbuh dari akar budaya dan tradisi setempat, sehingga menghasilkan produk atau layanan yang autentik dan memiliki daya saing di pasar global. Di sisi lain, potensi lokal seperti sumber daya manusia, seni budaya, kerajinan tradisional, dan warisan lokal menjadi modal dasar dalam membangun identitas ekonomi kreatif suatu daerah. Ketika potensi lokal dikelola secara profesional dan didukung oleh akses pasar serta teknologi, maka akan tercipta peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis pada kekuatan lokal. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, ekonomi kreatif tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sarana pelestarian budaya, peningkatan kualitas hidup, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah (Maria,2024).

Pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi kreatif menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diidentifikasi.

- 1) Komitmen Politik yang Konsisten, keberhasilan kemitraan publik-swasta sangat bergantung pada dukungan politik yang stabil dari pemerintah. Tanpa komitmen yang kuat, proyek kemitraan dapat menghadapi ketidakpastian kebijakan yang menghambat pelaksanaan dan keberlanjutan proyek.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas, proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan antara pihak publik dan swasta, serta masyarakat. Kurangnya akuntabilitas juga meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam implementasi proyek.

Pemilihan Mitra yang Tepat, menentukan mitra swasta yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang baik merupakan tantangan tersendiri. Kesalahan dalam pemilihan mitra dapat menyebabkan proyek tidak berjalan sesuai harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Keterbatasan Akses Pembiayaan Inovatif, pelaku ekonomi kreatif sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan yang mendukung inovasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik unik dari sektor kreatif.

- 1) Kekurangan Tenaga Kerja Terampil di Bidang Teknologi, perkembangan ekonomi kreatif yang berbasis teknologi memerlukan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Namun, ketersediaan

sumber daya manusia dengan keterampilan tersebut masih terbatas, sehingga menghambat pertumbuhan sektor ini.

- 2) Minimnya Dukungan Infrastruktur dan Fasilitas, beberapa daerah belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi kreatif, seperti ruang kreatif, akses internet yang stabil, dan fasilitas produksi. Kekurangan ini membatasi potensi pengembangan sektor kreatif di wilayah tersebut.
- 3) Kurangnya Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan, sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan sektor swasta sering kali belum optimal. Padahal, kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan upaya kolaboratif dan strategi yang terintegrasi dari semua pihak terkait. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan kemitraan. Sementara itu, sektor swasta diharapkan dapat berkontribusi melalui investasi, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan

### ***Dampak Collaborative Governance terhadap Ekosistem Ekonomi Kreatif***

Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi kreatif memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan budaya. Kolaborasi ini membentuk suatu ekosistem yang lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing. Menurut Osborne (2000), model governance kolaboratif memungkinkan peran negara berubah dari pelaku utama menjadi fasilitator, di mana fungsi negara adalah menciptakan ruang tumbuh yang kondusif bagi aktor non-negara, termasuk sektor swasta dan komunitas. Dalam konteks ekonomi kreatif, hal ini menciptakan fondasi sistemik yang mendorong penciptaan nilai berbasis kreativitas dan pengetahuan.

Salah satu dampak utama dari kemitraan ini adalah terciptanya ekosistem yang lebih inklusif, khususnya dengan meningkatnya keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), komunitas lokal, serta generasi muda. Pemerintah menyediakan ruang inkubasi dan akses pembiayaan, sementara swasta berkontribusi dalam bentuk mentoring bisnis dan teknologi. Inklusivitas ini menjadikan ekonomi kreatif sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan peluang ekonomi di luar sektor formal tradisional. Selain itu, kemitraan strategis turut mendorong peningkatan daya saing industri kreatif, baik di pasar domestik maupun internasional. Kolaborasi ini memungkinkan terjadinya transfer teknologi, inovasi produk, serta ekspansi jaringan distribusi. Adanya dukungan dari sektor swasta, terutama dalam bentuk investasi teknologi dan pelatihan SDM, mempercepat proses adopsi digital di kalangan pelaku usaha kreatif. Hal ini sejalan dengan temuan Yulianingsih (2020) yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat transformasi digital dan meningkatkan visibilitas produk kreatif di pasar global.

Dampak lainnya terlihat pada pertumbuhan ekonomi regional, khususnya di daerah yang menerapkan pendekatan kota kreatif (*creative city*). Di wilayah seperti Bandung, Yogyakarta, dan Malang, integrasi antara sektor pariwisata, budaya, dan teknologi menjadi penggerak ekonomi baru. Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi yang mendukung, sementara swasta mengambil peran penting dalam pengembangan destinasi kreatif melalui festival, ruang kreatif, dan kerja sama internasional. Lebih lanjut, kemitraan juga berdampak pada transformasi sektor informal yang selama ini kurang tersentuh oleh kebijakan konvensional. Pelaku informal, seperti seniman jalanan, perajin lokal, dan produsen budaya tradisional, kini mulai diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi melalui program pelatihan, digitalisasi produk, dan akses ke pasar daring. Proses ini bukan hanya meningkatkan pendapatan pelaku informal, tetapi juga memperkaya keragaman produk dalam ekonomi kreatif nasional. Namun demikian, efektivitas dampak tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan kemitraan dan kejelasan peta jalan (*roadmap*) yang disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah dituntut untuk lebih adaptif dalam merancang kebijakan yang akomodatif terhadap perubahan teknologi dan tren pasar global. Sementara itu, sektor swasta perlu menunjukkan komitmen jangka panjang, tidak hanya sebagai investor, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Terakhir, dampak yang tak kalah penting adalah perubahan budaya kerja dan inovasi di lingkungan pelaku usaha kreatif. Dalam iklim kolaboratif, pelaku UMKM maupun industri menengah terdorong untuk menerapkan pola kerja berbasis jejaring, terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, dan lebih

berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini menjadikan kemitraan bukan hanya sebagai strategi teknis, tetapi juga sebagai paradigma baru dalam tata kelola ekonomi kreatif.

## **SIMPULAN**

*Collaborative Governance* sangat penting bagi pengembangan dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Selain memberi pelaku ekonomi kreatif akses yang lebih besar terhadap modal, infrastruktur, dan teknologi, kolaborasi ini memperluas jaringan pasar dan meningkatkan daya saing produk kreatif daerah. Sektor swasta hadir sebagai katalisator inovasi, investasi, dan distribusi, sementara pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dengan menetapkan undang-undang yang menguntungkan dan menawarkan layanan tambahan. Pendekatan kooperatif ini dapat mendorong perluasan ekonomi kreatif dalam jangka panjang, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, koordinasi lintas sektor yang kuat, keterbukaan dalam pelaksanaan program, dan tinjauan berkala diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas kolaborasi kebijakan ini serta untuk beradaptasi dengan tuntutan industri yang terus berkembang. Di era ekonomi digital, kemitraan publik-swasta dapat memainkan peran penting dalam mencapai ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan melalui strategi kolaboratif yang metodis dan berorientasi pada hasil.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada para ahli dan peneliti terdahulu yang karyanya menjadi landasan penting dalam memperkaya analisis dan pemahaman saya. Penghargaan mendalam juga saya tujukan kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penulisan berlangsung. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada lembaga dan institusi yang menyediakan akses literatur sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## **REFERENSI**

- Aminah, R., & Hasibuan, D. (2022). Peningkatan kualitas SDM dalam industri kreatif. *Jurnal Riset Ekonomi Kreatif*, 2(3).
- Fakhrudin, M. (2023). Evaluasi strategi kemitraan pemerintah-swasta dalam pengembangan ekonomi kreatif. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(1).
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Indrawati, S., & Musnaini, N. (2021). Peran komunikasi dalam implementasi PPP di daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan Daerah*, 6(2).
- Kurniawan, R., & Prasetyo, D. (2022). Strategi kemitraan pemerintah-swasta dalam penguatan ekonomi kreatif daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah*, 6(2).
- Musta'in, M. M., Muafiqie, M. S. D. H., Karman, M. S. A., & Kalsum, M. U. (2022). *Ekonomi kreatif berbasis digital dan kemandirian masyarakat era society 5.0*.
- Osborne, S. P. (2000). *Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective*. Routledge.
- Risman, H., Fadli, M., & Nursyam, A. (2021). Memperkuat infrastruktur pendukung: Peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis komunitas lokal di desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Riswanto, A., Zafar, T. S., Sunijati, E., Harto, B., Boari, Y., Astaman, P., ... & Hikmah, A. N. (2023). *EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- RUSTAN, M. F. (2020). *Pusat Pengembangan Industri Kreatif Di Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Sitorus, M., & Mahalli, K. (2019). Evaluasi keberlanjutan kemitraan dalam proyek infrastruktur ekonomi kreatif. *Jurnal Infrastruktur*, 7(2).

- Untoro, D. (2022, April 21). Upaya pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/21/04000091>.
- Utama, A., & Murfhi, A. (2017). Analisis Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 115-127.
- Wahjono, S. I., Marina, A., & Kurniawati, T. (2021). *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*. Syiah Kuala University Press.
- Yulianingsih, R. (2020). Keterlibatan masyarakat dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 4(1).
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi birokrasi: Dunia birokrasi dan pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.